

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan tujuan dasar untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial termasuk dalam urusan ekonomi.

Salah satu upaya dalam memajukan ekonomi desa dan menumbuhkan kemandirian dalam pengelolaannya adalah dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.11 Tahun 2021 tentang BUMDes pasal 1, menerangkan bahwa BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Usaha BUMDes adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDes. Unit usaha BUMDes adalah badan usaha milik BUMDes yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi

dan/ atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDes.

Desa Cipeundeuy merupakan desa yang dimana kegiatan perekonomiannya diatur oleh BUMDes. Kegiatan-kegiatan yang diatur langsung oleh BUMDes antara lain adalah perdagangan (pasar), wisata, pertanian, peternakan, perikanan, jasa, dan sanitasi air. Pasar Desa Cipeundeuy telah berdiri sejak tahun 1980-an. Pengelolaan Pasar Desa Cipeundeuy sebelumnya dikelola langsung oleh pemerintah desa Cipeundeuy, namun sejak tahun 2022 di masa jabatan kepala desa yang baru, BUMDes didirikan untuk mengelola langsung kegiatan yang terjadi di Pasar Desa Cipeundeuy. BUMDes Pasar Desa Cipeundeuy didirikan untuk mengatasi ketidakefektivan pengelolaan Pasar yang semula dikelola oleh pemerintah desa. Dasar hukum BUMDes Cipeundeuy termuat dalam peraturan Desa Cipeundeuy Nomor 2 Tahun 2022 tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Anugrah Karya Mandiri. Dalam Perdes tersebut juga dibahas mengenai Anggaran Dasar (AD) BUMDes Cipeundeuy. Sedangkan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes Cipeundeuy dimuat dalam Peraturan Kepala Desa (PERKADes) Cipeundeuy Nomor 2 Tahun 2022. Adapun secara spesifik di wilayah Kabupaten Bandung Barat pengaturan mengenai BUMDes yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2007 tentang pedoman pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pasar desa sebagai aset desa harapannya mampu memenuhi kebutuhan Masyarakat pedesaan serta memberikan retribusi yang besar bagi pendapatan desa. Membangun pasar desa di suatu desa merupakan salah satu pilihan yang cerdas bagi

desa untuk membangun putaran ekonomi internal desa. Dengan peran penting pemerintah, diharapkan pasar desa mampu meningkatkan perekonomian desa dan juga berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Selain itu pasar desa berfungsi untuk memasarkan produk yang terolah oleh Masyarakat desa dan sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah desa. Maka dari itu, pasar desa menjadi salah satu jenis usaha yang paling banyak dilakukan oleh BUMDes di berbagai daerah.

Pasar Desa Cipeundeuy merupakan pasar desa. Pasar desa adalah pasar yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi, atau swadaya masyarakat. Letak perbedaan pasar desa dengan pasar tradisional dapat dilihat dari segi pengelolaannya. Pasar desa dikelola langsung oleh pemerintah desa dengan dana pengelolaan bersalah dari APBDes, sedangkan pasar tradisional dikelola oleh pemerintah daerah dengan dana pengelolaan berasal dari APBD. Hal ini mengacu pada Peraturan Bupati Bandung Barat No. 9 tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Pasar Desa di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat.

Pasar Desa Cipeundeuy yang dikelola oleh BUMDes menyumbang PADes yang cukup besar. Sejak Pasar Desa Cipeundeuy dikelola oleh BUMDes, kenaikan Pendapatan Asli Desa (PADes) naik secara signifikan sebanyak 181% yang dimana pada tahun 2022 jumlah PADes berada di angka Rp. 114,454,500 lalu dan di tahun 2023 jumlah angka tersebut menjadi Rp. 321,881,000. Namun, data yang diambil melalui wawancara antara peneliti dan pedagang dalam perubahan pengelolaan Pasar Desa Cipeundeuy di tangan BUMDes, pedagang pasar mengeluhkan bahwa

pengelolaan pasar tersebut justru kurang berdampak baik bagi mereka seperti kenaikan harga sewa secara keseluruhan, pemeliharaan fasilitas yang tidak optimal, dan adanya program relokasi pasar yang memberatkan pedagang dari sisi kenaikan biaya.

Pada tahun 2022, kepala desa Desa Cipeundeuy memerintahkan untuk dibangunnya relokasi pasar di Pasar Desa Cipeundeuy. Sekitar 78% warga Desa Cipeundeuy setuju akan dilakukannya relokasi pasar. Alasan dilakukannya relokasi pasar adalah karena bangunan pasar yang sebelumnya sudah cukup tua yaitu sudah dibangun sejak tahun 1980an. Untuk pedagang yang akan direlokasi adalah para pedagang yang menjual bahan kering seperti pakaian, perabotan, dan hal lainnya. Terdapat sekitar 160 kios yang akan dibangun di gedung pasar yang baru. Namun, hanya sekitar 50 kios yang akhirnya akan dibangun oleh pemerintah. Hal itu terjadi karena harga kios di gedung pasar yang baru ada dikisaran 75 juta untuk 15 tahun. Harga ini tentu harga yang fantastis bagi para pedagang untuk mereka bayar. Harga kios sebelumnya hanya 25 juta dan sekarang harga tersebut naik sebesar lebih dari 2 kali lipat. Untuk para pedagang yang sebelumnya sudah membayar uang deposit sebesar 1 juta memilih untuk tidak melanjutkan pembayaran karena harga yang cukup mahal untuk kios baru di gedung yang sedang dibangun.

Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis problematisasi lahirnya BUMDes untuk mengelola Pasar Desa Cipeundeuy. Sebab, perubahan teknis pengelolaan Pasar Desa Cipeundeuy sarat akan kepentingan. Pendekatan WPR (*What's the Problem Represented to be?*) digunakan agar dapat menganalisis masalah siapa yang sebenarnya sedang direpresentasikan dari lahirnya sebuah

kebijakan baru atau perubahan kebijakan. Pendekatan WPR (*What's the Problem Represented to be?*) merupakan teknik yang digunakan untuk mengevaluasi kebijakan publik. Ada persepsi luas di masyarakat bahwa kebijakan publik selalu berdampak positif dan ditujukan untuk memperbaiki kondisi masyarakat namun kenyataannya tidak selalu begitu. Pendekatan WPR digunakan untuk mengidentifikasi dan memeriksa 'masalah' yang ada dalam kebijakan publik. Ini berfungsi sebagai instrumen bagi masyarakat untuk mengevaluasi kebijakan publik secara kritis, bukan hanya menerima kebijakan sebagaimana adanya dan menganggap semua kebijakan dirancang untuk menyelesaikan masalah. Tujuan dari pendekatan WPR bukanlah untuk menemukan 'masalah' yang sebenarnya dan mencari 'solusi' yang tepat, tetapi untuk memperhatikan dan mengkritik bagaimana representasi 'masalah' tersebut dapat muncul, dan bagaimana ia membentuk 'solusi' dalam masyarakat dan subjektivitas di dalamnya.

Penelitian ini juga akan menganalisis secara lebih lanjut mengenai keterlibatan elit desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Keterlibatan elit menjadi sangat dimungkinkan karena problematisasi masalah cenderung akan dimenangkan oleh aktor yang memiliki kuasa atau sumber daya.

I.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses problematisasi masalah dari dibentuknya BUMDes Anugrah Karya Mandiri untuk mengelola Pasar Desa Cipeundeuy?
2. Bagaimana peran aktor yang memiliki *power* dalam pembentukan BUMDes?

I.3 Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana proses problematisasi masalah dari sudut pandang masalah siapa yang direpresentasikan dalam pembentukan BUMDes Anugrah Karya Mandiri untuk mengelola Pasar Desa Cipeundeuy.
2. Mengetahui dan menganalisis bagaimana proses problematisasi masalah dari sudut pandang aktor mana yang memiliki *power* terbesar dalam pembentukan BUMDes Anugrah Karya Mandiri untuk mengelola Pasar Desa Cipeundeuy.

I.4 Manfaat Penelitian

Bedasarkan tujuan di atas maka dapat ditarik beberapa manfaat di antaranya:

1. Manfaat teoritis: Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana kebijakan publik, seperti pembentukan BUMDes, dapat mempengaruhi perekonomian dan pembangunan di tingkat desa, dan memberikan studi kasus konkret (Desa Cipeundeuy) yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian terkait kebijakan publik dan pembangunan desa.
2. Manfaat empiris: Penelitian ini membantu pemerintah dalam memahami dampak dan implikasi dari pembentukan BUMDes, sehingga pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat desa. Memberikan wawasan tentang bagaimana BUMDes dapat

dikelola untuk meningkatkan perekonomian desa dan memberdayakan masyarakat. Penelitian ini juga membantu masyarakat desa memahami peran dan fungsi BUMDes, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat mempengaruhi kehidupan mereka.

I.5 Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan penelitian “Penerapan Konsep *What’s The Problem Represented to Be Approach* dalam Pembentukan BUMDes: Studi Kasus Pengelolaan Pasar Desa Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat,” peneliti melakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah menganalisis pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Peneliti menggunakan lima hasil penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan topik penelitian. Kajian pustaka ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti.

Pada penelitian terdahulu pertama, Ferdi Horobu Ubi Laura Agung Suprojo (2019) dalam penelitiannya yang berjudul *Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)* mengkaji peran Pemerintah Desa Tlekung dalam pengembangan BUMDes, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam pelaksanaan peran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tlekung, Kota Batu, Jawa Timur. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat lima peran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Tlekung dengan faktor-faktor pendukung, seperti tersedianya sarana prasana, adanya kebijakan khusus mengenai pengurus, serta adanya pembinaan dan pengawasan. Penelitian ini turut memberikan hasil pembahasan mengenai faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Tlekung, yakni minimnya kesadaran masyarakat dalam

melakukan pengembalian piutang, dan minimnya kemampuan pengurus dalam hal pembuatan laporan keuangan. Adapun kesamaan antara penelitian oleh Suprojo (2019) dengan penelitian ini ialah metode penelitian yang digunakan. Kedua penelitian menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan perumusan masalah deskriptif. Kesamaan penelitian juga dapat ditemukan dari sumber data penelitian, yakni wawancara dengan informan yang berkaitan secara langsung dengan topik penelitian serta penggunaan teknik *purposive sampling*. Tidak hanya itu, kedua penelitian juga memiliki kesamaan dalam pelaksanaan observasi langsung pada lokasi penelitian. Kedua penelitian juga menggunakan teknik triangulasi data sebagai teknik validasi data. Adapun perbedaan dari kedua penelitian adalah subjek fenomena penelitian. Penelitian oleh Suprojo (2019) menjadikan Pemerintah Desa Tlekung sebagai subjek penelitian, sedangkan penelitian ini menjadikan BUMDes Anugrah Karya Mandiri sebagai pengelola Pasar Desa Cipendeuy sebagai subjek penelitiannya. Perbedaan selanjutnya dapat ditemukan dalam teori penelitian. Penelitian ini secara spesifik menggunakan teori *WPR Approach* atau '*What's the Problem Presented to Be?*' dan diiringi dengan teori elit sebagai dasar analisis pembahasan penelitian. Di sisi lain, penelitian Suprojo (2019) tidak secara spesifik menggunakan teori penelitian saat menganalisis fenomena pembahasan di dalam penelitiannya.

Penelitian yang memiliki bahasan serupa juga dilakukan oleh Bahri & Rohim (2020) dengan judul Dominasi Elit Desa dalam Pengelolaan BUMDes di Desa Kemuningsari Lor Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Hasil penelitian Bahri & Rohim (2020) menunjukkan bahwa kelompok elit di Desa Kemuningsari

Lor Kecamatan Panti Kabupaten Jember telah menjalankan perannya, seperti berlaku sebagai penasihat, pemberi saran dan pendapat, serta pengendali pelaksanaan pengelolaan BUMDes. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya hambatan dominasi kelompok elit desa dalam mengelola BUMDes, yakni terbatasnya sumber daya manusia, fasilitas, dan peralatan. Persamaan dari kedua penelitian dapat dilihat dari metode penelitian yang digunakan, yakni metode kualitatif-deskriptif. Di sisi lain, persamaan dan perbedaan dapat ditemukan sekaligus dalam teori yang digunakan oleh kedua penelitian. Baik penelitian Bahri & Rohim (2020) serta penelitian ini turut menggunakan teori elit dalam pembahasannya. Namun, penelitian Bahri & Rohim (2020) juga menyertakan teori peran serta teori pemerintah desa dalam penelitiannya. Di sisi lain, penelitian ini tidak menyertakan teori-teori tersebut, namun menggunakan teori *WPR Approach* atau '*What's the Problem Presented to Be?*' sebagai landasan analisis pembahasan penelitian. Adapun perbedaan kedua penelitian juga dapat ditemukan dari pokok pembahasan di mana penelitian Bahri & Rohim (2020) secara mendalam membahas mengenai peran-peran elit dalam pengelolaan BUMDes, sedangkan penelitian ini membahas praktik problematisasi dari dibentuknya BUMDes Anugrah Karya Mandiri untuk mengelola Pasar Desa Cipeundeuy. Lokasi kedua penelitian juga berbeda, di mana penelitian Bahri & Rohim (2020) bertempat di Desa Kemuningsari Lor, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, sedangkan penelitian ini berlokasi di Desa Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat.

Penelitian ketiga yang menjadi kajian pustaka dalam penelitian ini ditulis oleh Afifa Rachmanda Filya (2018) dengan judul *Optimalisasi Pengelolaan Badan*

Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan PADes di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro. Penelitian ini menyoroti optimalisasi pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan PADes atau Pendapatan Asli Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes sudah berjalan dengan baik, namun masih belum optimal. Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya beberapa indikator, yaitu tenaga kerja, modal, pangsa pasar, akuntabel, dan peningkatan laba/rugi. Persamaan yang telah ditemukan dari dua kajian pustaka sebelumnya dengan penelitian ini juga dapat ditemukan pada penelitian oleh Filya (2018). Penelitian Filya (2018) dan penelitian ini turut menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif dan menggunakan teknik wawancara sebagai proses pengumpulan data. Namun, perbedaan dapat ditemukan dari konsep dan teori yang digunakan. Penelitian yang ditulis oleh Filya (2018) menggunakan konsep optimalisasi sebagai landasan penelitiannya. Tidak hanya itu, penelitian ini juga menggunakan konsep prinsip pengelolaan badan usaha milik desa sebagai tinjauan pustaka penelitiannya, yang berisi dari enam prinsip, yakni kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, serta sustainabel. Di sisi lain, penelitian ini menggunakan teori *WPR Approach* atau '*What's the Problem Presented to Be?*' dan teori elit sebagai landasan analisis pembahasan penelitian. Perbedaan juga dapat ditemukan dari fenomena pokok pembahasan dan lokasi penelitian. Penelitian Filya (2018) memiliki pokok pembahasan optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), sedangkan penelitian ini menganalisis praktik dan proses problematisasi dari

dibentuknya BUMDes Anugrah Karya Mandiri. Adapun penelitian Filya (2018) berlokasi di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Di sisi lain, penelitian ini membahas fenomena di Desa Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat.

Penelitian keempat yang menjadi kajian pustaka dalam penelitian ini ditulis oleh Asprianus Jepri (2019) dengan judul Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Melalui BUMDes Program Pasar Desa yang bertujuan untuk memahami strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Landungsari, Kabupaten Malang. Fokus penelitian adalah bagaimana pasar desa dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan kemandirian ekonomi. Menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan teknik Snowball Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan strategi pengelolaan pasar desa dimulai dari analisis peluang dan potensi, yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk penyewaan los dan bedak kepada masyarakat lokal. Pengelolaan diarahkan pada pasar tradisional dengan struktur manajemen yang melibatkan beberapa bidang seperti retribusi, keamanan, dan kebersihan. Evaluasi program dilakukan setiap tiga bulan untuk menilai keberhasilan strategi yang diterapkan. Meskipun pasar desa mengalami hambatan, terutama dalam hal kepengurusan yang belum maksimal dan penertiban pedagang, komitmen untuk menjalankan program tetap kuat. Faktor pendukung utama adalah partisipasi aktif masyarakat serta dukungan dari pemerintah daerah, sementara faktor penghambat mencakup keterbatasan dalam manajemen dan penertiban

pedagang. Kesimpulannya, BUMDes memiliki potensi besar dalam mendukung kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun perlu adanya peningkatan pada pengelolaan agar hasilnya lebih maksimal.

Penelitian kelima yang menjadi kajian pustaka dalam penelitian ini ditulis oleh Syahrani Firdaus (2018) dengan judul Fenomena Elite Capture dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Studi Kasus Strategi Bekerjanya Kekuasaan Elite dalam Pengelolaan BUMDes Argosari, Desa Pulosari, Kabupaten Pemalang membahas fenomena dominasi kekuasaan elite dalam pengelolaan BUMDes. Elite capture merujuk pada penguasaan oleh aktor elite yang memanfaatkan BUMDes untuk kepentingan pribadi.

Penelitian ini berfokus pada BUMDes Argosari di Desa Pulosari, Kabupaten Pemalang, menggunakan analisis Power Cube untuk memahami bagaimana kekuasaan elit bekerja di berbagai tahap pengelolaan BUMDes, yaitu agenda setting, implementasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa memiliki pengaruh dominan dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan BUMDes. Hal ini terlihat dari pengangkatan pengurus BUMDes, yang dilakukan tanpa koordinasi dengan Badan Pengawas Desa (BPD), serta kontrol penuh dalam pengelolaan unit usaha BUMDes.

Meskipun terdapat kekuatan penyeimbang dari Ketua BPD yang mencoba melakukan pengawasan, dominasi Kepala Desa tetap sulit dilawan. Elite capture terjadi pada hampir setiap tahap pengelolaan BUMDes, terutama melalui kontrol yang ketat oleh Kepala Desa dalam proses implementasi dan monitoring.

Dampaknya, pengelolaan BUMDes lebih menguntungkan segelintir pihak dan tidak sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat yang luas.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa BUMDes, yang awalnya diharapkan menjadi alat untuk meningkatkan kemandirian ekonomi desa, justru rentan terhadap dominasi kekuasaan elite lokal. Fenomena elite capture menunjukkan bahwa desentralisasi tidak selalu menghasilkan pemerintahan desa yang partisipatif jika struktur elite lama tetap dominan.

I.6 Kerangka Teori

I.6.1 WPR Approach

WPR Approach atau ‘*what’s the problem presented to be?*’ merupakan salah satu pendekatan dalam ilmu politik yang digunakan untuk menganalisis kebijakan publik. Dalam masyarakat, terdapat asumsi mendasar bahwa kebijakan publik merupakan hal yang baik dan selalu memiliki tujuan untuk memperbaiki keadaan masyarakat. Kebijakan-kebijakan ini tentu dicetuskan oleh para pembuat kebijakan atau pemerintah. Istilah ‘memperbaiki’ membawa pemahaman bahwa ada yang perlu ‘diperbaiki,’ bahwa terdapat ‘masalah’ yang perlu diatasi hingga perlu dicetuskan kebijakan tertentu. Namun, ‘masalah’ ini tidak selalu dijelaskan secara eksplisit oleh pemerintah. Di sinilah pendekatan ‘*what’s the problem presented to be?*’ atau *WPR Approach* dapat digunakan untuk menganalisis ‘masalah’ yang tersirat dalam kebijakan publik dan meneliti kebijakannya dengan cermat (Bacchi, 2014).

Dalam tulisannya yang berjudul *Introducing WPR: A Work in Progress*, (Bacchi, 2021) menekankan bahwa kata kunci dalam *WPR Approach* adalah

problematisasi. Dengan kata lain, kebijakan yang dicetuskan oleh pemerintah dapat diasumsikan sebagai praktik problematisasi. Osborne (1997) menekankan kata kunci problematisasi ini dengan menyatakan bahwa pemerintah tidak dapat berjalan tanpa terlebih dahulu melakukan praktik problematisasi dalam wilayahnya. Osborne (1997) juga turut menyatakan pendapat yang tidak jauh berbeda dengan Bacchi (2014), yaitu kebijakan dari pemerintah ‘mengklaim’ untuk ‘memperbaiki’ sesuatu, hingga masyarakat, secara alami, berasumsi bahwa memang terdapat ‘masalah’ yang perlu ‘diperbaiki.’ Pada tingkatan inilah terjadi praktik problematisasi.

Osborne (1997), lebih lanjut, menyatakan bahwa masyarakat diperintah oleh pemerintah melalui praktik problematisasi, dan bukan melalui kebijakan itu sendiri. Maka dari itu, penting bagi masyarakat untuk memberikan perhatian lebih bagi bentuk dan karakter dari problematisasi, dan tidak semata-mata menerima asumsi dari ‘masalah’ yang secara implisit disajikan oleh pemerintah. *WPR Approach* sendiri berperan sebagai media bagi masyarakat untuk menganalisis kebijakan publik secara kritis. Tidak secara gamblang menerima kebijakan yang ada dan menganggap seluruh kebijakan hadir untuk menyelesaikan masalah. *WPR Approach* memiliki enam bentuk dari pertanyaan atau analisis yang dapat diaplikasikan saat mencermati kebijakan yang ada (Bacchi, 2021).

1. Apa ‘masalah’ yang direpresentasikan dari kebijakan yang terbentuk?
2. Apa prasangka dan asumsi yang direpresentasikan dari ‘masalah’ tersebut?
3. Bagaimana representasi ‘masalah’ ini dapat terjadi?

4. Apa hal yang tidak turut bernilai bermasalah dalam representasi masalah tersebut? Mengapa ada keheningan terhadap representasi tersebut? Apakah ‘masalah’ ini dapat dipikirkan secara berbeda melalui perspektif lain?
5. Apa efek yang dihasilkan dari representasi ‘masalah’ tersebut?
6. Bagaimana atau dari mana representasi dari ‘masalah’ ini berasal, tersebarluaskan, dan dipertahankan? Bagaimana masyarakat dapat mempertanyakan, mengkritik, dan mengganti representasi ‘masalah’ ini?

Dikutip dari Bacchi (2014) melalui Du (2006), *WPR Approach* digunakan untuk menganalisis kebijakan melalui perspektif “mempertanyakan masalah (*problem questioning*),” dan bukan “menyelesaikan masalah (*problem solving*).” Pendekatan ini mengasumsikan bahwa beberapa representasi ‘masalah’ dalam masyarakat dapat bersifat menguntungkan bagi golongan kelompok tertentu dan bisa merugikan golongan kelompok yang lain. Pendekatan ini berpihak pada mereka yang dirugikan, dengan tujuannya yang mengintervensi dan menantang ‘masalah’ yang ada. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari *WPR Approach* bukanlah untuk menemukan ‘masalah’ yang sebenarnya dan mencari ‘solusi’ yang tepat, namun untuk mencermati dan mengkritik bagaimana representasi ‘masalah’ tersebut bisa muncul, serta bagaimana ia membentuk sebuah ‘solusi’ di masyarakat dan subjektivitas di dalamnya.

I.6.2 Teori Elit

Pelaku-pelaku dalam dunia politik tentu memerlukan peraturan atau pedoman. Hal ini biasa dikenal sebagai kebijakan publik. Kebijakan ini tidak dirumus oleh sembarang orang, melainkan hanya yang berwenang yang dapat

membuat dan menggerakkan kebijakan publik tersebut, atau dapat disebut dengan kelompok elit. Salah satu pencetus teori elit klasik ialah Gaetano Mosca (1858-1941), seorang ahli hukum dan ahli teori politik Italia. Dalam bukunya yang berjudul *The Ruling Class* (1939), Mosca mendefinisikan dua kelas dalam masyarakat. Kelas pertama ialah kelas masyarakat yang berkuasa (*the ruling class*) dan kelas kedua ialah kelas masyarakat yang dikuasai (*the ruled class*). Kelas masyarakat yang berkuasa merujuk kepada kelompok elit yang jumlahnya eksklusif atau selalu lebih sedikit dibanding kelas masyarakat yang dikuasai. Kelas ini juga menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan, dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapat dari kekuasaan. Sedangkan, kelas kedua atau masyarakat yang dikuasai berjumlah lebih banyak, serta diarahkan dan dikendalikan oleh kelas pertama (Delican, 2000).

Kelompok elit juga disebut sebagai sekelompok orang yang mengatur dan memelihara kebijakan publik yang turut bergerak sesuai keinginan mereka. Dengan demikian, setiap kejadian dalam masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan dan arahan merupakan hasil dan akibat dari tindakan maupun kelambanan mereka (Ajisola, 2023). Mariotti (2020) menjelaskan bahwa sejak tahun 1950-an, terdapat dua pendekatan berbeda yang muncul dalam teori elit, yakni elitisme dan pluralisme. Elitisme menggambarkan golongan elit sebagai kelompok yang unik dan kohesif, sedangkan kekuasaan bersifat kumulatif, sehingga para elit dapat dipastikan memiliki kekuasaan selama orang lain di luar mereka tidak mempunyai kekuasaan. Di sisi lain, pluralisme mendefinisikan kekuasaan sebagai sesuatu yang relasional, berubah-ubah tergantung dengan konteks dan pihak-pihak yang sedang

bersaing. Dalam pandangan ini, para elit dinilai terdiri dari golongan yang ingin mencapai suatu kepentingan tertentu, diiringi dengan eksistensi lawan atau oposisi. Pihak oposisi diisi oleh kelompok-kelompok dengan kepentingan yang berbeda-beda di dunia politik dengan struktur, komposisi, dan tujuan yang turut sering berubah, hingga sangat sulit untuk mewujudkan hierarki kekuasaan yang kokoh dan bertahan lama.

Dikutip dari Burnham (1943) melalui Damele & Campos (2022), teori elit klasik mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Tujuan utama dari setiap elit atau golongan penguasa ialah mempertahankan kekuasaan dan hak istimewa mereka.
2. Kekuasaan kaum elit, tidak harus secara eksplisit, didasarkan pada pemaksaan dan penipuan. Struktur sosial mereka dipertahankan dengan formula politik yang biasanya berhubungan dengan agama, ideologi, atau mitos yang diterima secara umum
3. Setiap elit memiliki dua kecenderungan yang berlawanan:
 - a. Kecenderungan aristokrat: elit berusaha mempertahankan posisi penguasa para anggotanya dan melarang orang lain memasuki jajarannya;
 - b. Kecenderungan untuk adanya demokrasi yang mana (i) golongan atau elemen baru memaksa masuk ke dalam elit dari bawah atau (ii) kelas penguasa atau elit membuka jalan bagi orang baru dan mengambil elemen atau golongan baru dari bawah.

4. Dalam jangka panjang, demokratis cenderung untuk ‘menang.’ Maka dari itu, tidak ada struktur sosial yang permanen dan abadi.
5. Saat kecenderungan aristokrat mendominasi, maka dapat terjadi pergeseran cepat dalam komposisi dan struktur para elit, seperti revolusi sosial.

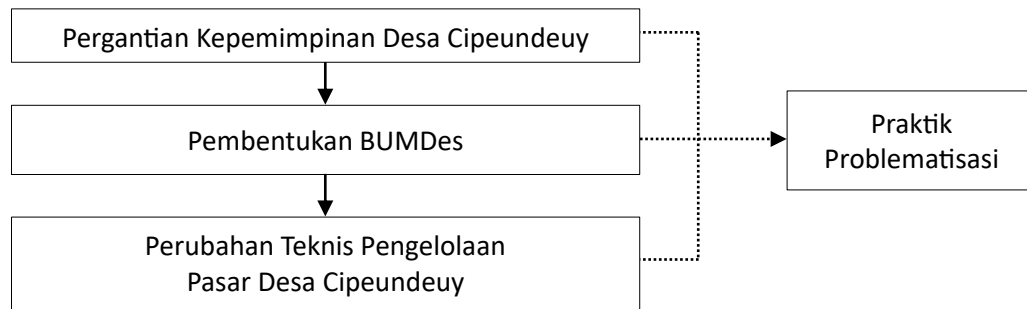
Dalam konteks ini, elit yang dimaksud adalah elit lokal di tingkat desa. Elit politik atau elit lokal dalam struktur pemerintahan desa, meskipun merupakan sekelompok kecil, memiliki kekuatan besar dalam membuat keputusan politik yang berdampak pada masyarakat. Meski proses pengambilan keputusan secara demokratis mungkin lebih mudah dilakukan, namun penekanan yang diberikan pada pengambilan keputusan di tingkat organisasi yang lebih rendah cenderung menghasilkan keputusan yang tidak hanya meningkatkan kualitas keputusan itu sendiri, tetapi juga memperbaiki proses pengambilan keputusan.

Ufford (1988) dalam (Hamariu, Noak, & Erawan, 2021) menyatakan bahwa keberadaan elit lokal turut dipengaruhi oleh faktor struktural dan organisasional yang menghasilkan dua kelompok, yakni kelompok yang berada pada birokrasi pemerintah (*governing elite*), seperti organisasi pemerintahan desa dan jabatan formal di sekitarnya, serta kelompok elit di luar birokrasi pemerintah (*non-governing elite*), seperti bangsawan, tokoh adat, dan tokoh agama. Keduanya memiliki kekuasaan besar sebagai agen perubahan di masyarakat, serta dalam pembangunan kemajuan desa. Kedua kelompok elit ini juga tak jarang menggunakan kekuasaannya untuk bekerja sama atau bahkan berkompetisi dalam aspek pembangunan desa, mulai dari pengambilan keputusan hingga pelaksanaan

program-program pembangunan. Kolaborasi dan konflik antara mereka dapat menentukan arah perkembangan desa dan kesejahteraan masyarakatnya.

I.7 Kerangka Berpikir

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



Pola kerangka pemikiran ini menjelaskan bahwa adanya pergantian kepemimpinan Desa Cipeundeuy. Pergantian kepemimpinan tersebut selanjutnya melahirkan terbentuknya BUMDes di Desa Cipeundeuy. Dengan adanya BUMDes ini terjadilah perubahan teknis pengelolaan pasar desa cipeundeuy. BUMDes pasar desa cipeundeuy merupakan fenomena yang menjembatani perubahan kepemimpinan dengan perubahan teknis pengelolaan pasar. Dari pergantian kepemimpinan desa cipeundeuy terdapat gap dengan perubahan teknis pengelolaan pasar desa cipeundeuy yang menyebabkan terjadinya praktik problematisasi. BUMDes menjadi salah satu medium untuk menengahi gap antara pergantian kepemimpinan desa cipeundeuy terdapat gap dengan perubahan teknis pengelolaan pasar desa cipeundeuy. Dari situlah ketiga kotak tersebut saling terhubung satu sama lain walaupun terdapat gap. Oleh sebab itu BUMDes menjadi medium untuk menengahi gap tersebut. Namun ketiga kotak tersebut saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan dan dari sinilah terjadinya praktik problematisasi.

I.8 Operasionalisasi Konsep

1. Perubahan kepemimpinan Desa Cipeundeuy merupakan proses pergantian sirkulasi kekuasaan dari kepala desa periode sebelumnya Dedi Rosadi ke periode kepala desa selanjutnya Rusmana Dismartika yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
2. Pembentukan BUMDes adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Cipeundeuy dalam bentuk pendirian BUMDes Anugerah Karya Mandiri untuk mengelola Pasar Desa Cipeundeuy setelah adanya pergantian kepemimpinan pengelolaan pasar sejak tahun 2022.
3. Perubahan teknis pengelolaan Pasar Desa Cipeundeuy merupakan proses peralihan kepemimpinan dan mekanisme pasar yang semula dikelola oleh pemerintah Desa Cipeundeuy secara langsung menjadi dikelola oleh BUMDes Anugrah Karya Mandiri.
4. Praktik problematisasi adalah cara untuk melihat bagaimana suatu “masalah” dipikirkan disejumlah kebijakan atau keputusan tertentu. Dalam hal ini, suatu hal yang tidak dianggap bermasalah dapat muncul sebagai “masalah”, kemudian problematisasi akan menganalisis bagaimana suatu hal tersebut dapat dikategorikan sebagai “masalah”.

Tabel 1.1 Operasionalisasi Konsep

Indikator	Teori	Sub Teori
Kepemimpinan pasar	Elit lokal Teori elit berpendapat bahwa kebijakan publik dikuasai oleh minoritas yang memiliki kekuatan politik. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan elit adalah elit lokal di tingkat desa. Meskipun kelompok	- Elit aristokrat, merupakan elit yang berusaha mempertahankan posisi penguasa para anggotanya dan melarang orang lain memasuki jajarannya. - Elit demokratik adalah kecenderungan yang

	elit lokal dalam struktur pemerintahan desa ini kecil, mereka memiliki pengaruh besar dalam menentukan kebijakan politik yang mempengaruhi masyarakat. Elit lokal diklasifikasikan menjadi dua indikator.	memungkinkan adanya sedikit ruang untuk demokrasi dalam bentuk (i) golongan atau elemen baru memaksa masuk ke dalam elit dari bawah atau (ii) kelas penguasa atau elit membuka jalan bagi orang baru dan mengambil elemen atau golongan baru dari bawah.
Praktik problematisasi	<i>WPR Approach</i> <i>WPR Approach</i> adalah metode yang digunakan untuk menganalisis kebijakan publik. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa kebijakan publik selalu bertujuan untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Namun, ‘masalah’ yang perlu ‘diperbaiki’ ini tidak selalu dijelaskan secara eksplisit oleh pemerintah. Oleh karena itu, Pendekatan WPR digunakan untuk menganalisis dan meneliti ‘masalah’ yang tersirat dalam kebijakan publik. Kebijakan yang dicetuskan oleh pemerintah dapat diasumsikan sebagai praktik problematisasi. Pendekatan WPR berfungsi sebagai alat bagi masyarakat untuk menganalisis kebijakan publik secara kritis, dengan enam indikator yang digunakan.	- Representasi masalah dari kebijakan atau keputusan. - Asumsi yang mendasari representasi masalah(logika konseptual) - Proses terbentuknya masalah. - Perspektif lain dari masalah. - Dampak dari representasi masalah. - Latar belakang dan proses distribusi munculnya masalah.

I.9 Metode Penelitian

I.9.1 Design Penelitian

Berdasarkan Martono (2010) metode penelitian merupakan rangkaian proses yang dijalankan secara teratur, sistematis, dan teliti untuk menemukan jawaban atas suatu pertanyaan. Tujuan peneliti adalah untuk memahami fenomena yang tidak dapat diukur secara kuantitatif dan bersifat deskriptif, seperti pemahaman tentang konsep tertentu, karakteristik objek atau subjek, gambaran visual, budaya tertentu, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti memilih pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan

gambaran yang akurat dan sistematis tentang fenomena, fakta, atau kejadian yang berkaitan dengan karakteristik populasi atau area tertentu. Alasan penggunaan metode penelitian kualitatif berjenis deskriptif adalah karena metode ini mampu menguraikan dan mendeskripsikan masalah yang diteliti oleh peneliti dalam studi ini. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan bagaimana proses problematisasi masalah dari dibentuknya BUMDes Anugrah Karya Mandiri untuk mengelola Pasar Desa Cipeundeuy.

I.9.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah perangkat desa Cipeundeuy, BUMDes Anugrah Karya Mandiri sebagai pengelola Pasar Desa Cipeundeuy, dan perwakilan pedagang Pasar Desa Cipeundeuy. Teknik dalam pengambilan data penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel non-acak di mana peneliti memilih informan tertentu yang membantu memenuhi tujuan penelitian. Dalam teknik ini, Informan dipilih berdasarkan penilaian peneliti, dengan mempertimbangkan karakteristik dan ciri-ciri tertentu agar mendapatkan sampel yang sesuai dengan penelitian. Karakteristik dan ciri-ciri informan adalah individu yang memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan topik penelitian dan mampu memberikan informasi yang akurat dan harus merupakan sumber yang memiliki kredibilitas dalam bidang yang dibahas. Dalam penelitian ini, subjek penelitian ini adalah pemerintah Desa Cipeundeuy, Pengelola Pasar Desa Cipeundeuy, dan Pedagang yang berjualan di Pasar Desa Cipeundeuy.

I.9.3 Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan data primer yang bersifat kualitatif karena data yang diperoleh berupa penjelasan secara deskriptif yang menggambarkan problematisasi lahirnya BUMDes untuk mengelola Pasar Desa Cipeundeuy. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pengamatan kondisi alami objek, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama. Metode penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dan lebih menekankan pada proses daripada hasil. Penelitian kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data secara detail, mencakup kedalaman makna dan analisis. Fokus peneliti adalah untuk memahami makna yang disampaikan oleh partisipan mengenai isu penelitian. Menurut Creswell (2016), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami makna dari sekelompok individu atau orang-orang yang menghadapi masalah sosial, seperti perilaku dan tindakan. Dalam konteks holistik, peneliti kualitatif berusaha untuk mendeskripsikan gambaran kompleks dari suatu masalah atau isu yang sedang diteliti dalam bentuk kata-kata.

I.9.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

Sumber data yang digunakan peneliti adalah:

1. Sumber data primer: Sumber data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berhubungan dengan isu yang sedang diteliti. Data ini diperoleh secara langsung oleh peneliti dari informan yang memiliki pengetahuan atau pendapat langsung tentang masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari informasi

yang diberikan oleh perangkat desa Cipendeuy, BUMDes Anugrah Karya Mandiri yang bertindak sebagai pengelola Pasar Desa Cipendeuy, dan perwakilan pedagang Pasar Desa Cipendeuy yang merupakan subjek utama dalam penelitian ini.

2. Sumber data sekunder: Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung. Sumber data sekunder biasanya berasal dari dokumen, penelitian sebelumnya, atau tulisan yang relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder yang digunakan meliputi jurnal penelitian yang berkaitan dengan pasar desa Cipendeuy dan pemerintah desa Cipendeuy, dokumen atau laporan terkait, serta artikel atau data yang diunggah di situs web.

I.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari:

1. Observasi:

Penulis penelitian ini melakukan studi lapangan dengan tujuan mengobservasi fenomena dan isu yang relevan dengan masalah yang diteliti. Penulis secara langsung terjun ke lapangan untuk mempelajari perilaku dan aktivitas subjek penelitian. Observasi ini dilakukan di lokasi penelitian. Dengan pengamatan langsung, penulis dapat memperoleh data dari kegiatan yang berlangsung, yang kemudian digunakan sebagai sumber data dalam merumuskan penelitian.

2. Wawancara:

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan dialog langsung antara pewawancara dan informan. Teknik ini melibatkan serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk menyelesaikan masalah atau isu yang sedang diteliti. Wawancara adalah teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan narasumber. Respons dari narasumber selama wawancara menjadi bahan mentah untuk studi. Dalam konteks wawancara kualitatif, peneliti dapat melakukan sesi tatap muka dengan narasumber, melakukan wawancara melalui telepon, atau melalui wawancara kelompok fokus yang melibatkan sejumlah narasumber. Teknik wawancara ini membutuhkan pertanyaan yang tidak terstruktur dan bersifat terbuka, yang dirancang untuk menggali pandangan dan opini dari narasumber (Creswell, 2016). Dalam konteks penelitian ini, wawancara dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan tentang pasar desa Cipendeuy, pertanyaan mengenai isu-isu yang muncul seiring dengan pembentukan BUMDes untuk mengelola pasar desa Cipeundeuy, serta pertanyaan mengenai langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Wawancara dilakukan secara tatap muka dan narasumber yang diwawancarai adalah perangkat desa Cipendeuy yaitu Rusmana selaku Kepala Desa, Caca selaku Perangkat Desa, dan Iyus selaku Sekretaris Pemerintah Desa Cipeundeuy, BUMDes Anugrah Karya Mandiri yang bertindak sebagai pengelola Pasar Desa Cipendeuy yaitu Moch Nurdin selaku Sekretaris BUMDes, dan empat perwakilan pedagang Pasar Desa Cipeundeuy.

3. Dokumentasi:

Metode dokumentasi merupakan suatu pendekatan dalam pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan, dan evaluasi dokumen baik dalam bentuk tulisan, gambar, foto, atau format elektronik. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi merujuk pada kumpulan dokumen yang diperlukan oleh peneliti, seperti dokumen yang berhubungan dengan perangkat desa Cipeundeuy, BUMDes Anugrah Karya Mandiri, dan dokumen lain yang relevan.

I.9.6 Teknik Validasi Data

Berdasarkan Sugiyono (2015:83), triangulasi data merupakan proses penggabungan berbagai jenis data dan sumber yang ada. Sementara itu, Wijaya (2018) mendefinisikan triangulasi data sebagai metode verifikasi data dari berbagai sumber, teknik triangulasi, pengumpulan triangulasi, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber: Ini melibatkan pengecekan kredibilitas data dengan melakukan verifikasi silang dari berbagai sumber data.
2. Triangulasi Teknik: Ini melibatkan pengecekan keabsahan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.
3. Triangulasi Waktu: Waktu dapat mempengaruhi kredibilitas data. Oleh karena itu, verifikasi kredibilitas data harus dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda hingga mendapatkan data yang kredibel.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber sebagai metode verifikasi data. Sumber tersebut meliputi Pemerintah Desa Cipeundeuy, Pengelola Pasar dan Pengurus BUMDe, serta pedagang Pasar Cipeundeuy.

I.9.7 Teknis Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang di peroleh adalah kualitatif. Menurut Miles and Huberman, analisis data kualitatif adalah proses di mana data diorganisir, dipilih, dan disusun dalam pola tertentu, kemudian disintesis untuk menemukan hal-hal yang penting dan yang dipelajari. Berikut adalah langkah-langkah dalam analisis data tersebut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dikumpulkan berkaitan dengan pengelolaan pasar desa, perubahan pengelolaan pasar desa yang semula dikelola oleh pemerintah desa yang kemudian dikelola oleh BUMDes, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan yang timbul akibat perubahan pengelolaan Pasar Desa Cipeundeuy. Data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data diperoleh, data tersebut dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan klasifikasi teknik pengumpulan data.

2. Reduksi Data

Dalam tahap analisis ini, peneliti menentukan elemen kunci dan berfokus pada aspek penting untuk mengidentifikasi pola dan menyortir data. Data yang telah disederhanakan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data berikutnya. Dalam

proses penyederhanaan data, peneliti menggunakan catatan lapangan untuk membantu dalam penyortiran data, yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan akhir.

3. Penyajian Data

Data yang telah diproses atau direduksi ditampilkan dalam bentuk narasi teks, yang merupakan susunan kalimat yang logis dan sistematis, sehingga dapat menggambarkan masalah dengan fleksibilitas. Penelitian ini menampilkan data dalam bentuk narasi teks, tabel, dan ilustrasi. Menurut Miles dan Huberman, seperti yang dikutip oleh Sugiyono (2008), penyajian data dalam penelitian kualitatif dirancang untuk mengintegrasikan informasi yang tersusun dalam format yang kohesif dan mudah dipahami, sehingga peneliti dapat memahami apa yang sedang berlangsung, memudahkan penarikan kesimpulan dari penelitian. Mereka percaya bahwa penyajian data yang efektif adalah metode utama dalam analisis kualitatif yang valid. Penyajian data dirancang untuk mengintegrasikan informasi yang tersusun dalam format yang kohesif dan mudah diakses. Dengan demikian, peneliti dapat memahami apa yang sedang berlangsung, dan kemudian dapat menentukan apakah kesimpulan yang diambil sudah benar atau perlu melanjutkan analisis lebih lanjut.

4. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Menurut Miles & Huberman (1992), dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan merupakan elemen integral dari suatu aktivitas yang

membentuk suatu kesatuan. Verifikasi kesimpulan dilakukan sepanjang proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara berkelanjutan sepanjang proses penelitian. Untuk mencapai kesimpulan akhir, data yang telah direduksi dikategorikan dan disajikan untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang berfungsi menjawab permasalahan yang dirumuskan.